

## Gerakan Sosial Masyarakat Pluit Putri Jakarta Utara (Studi Kasus: Penolakan Rencana Pembangunan Sekolah Bina Tunas Bangsa)

Febriyanti Valeria Roito<sup>1</sup>, Tiur Paulinawati<sup>2</sup>, Paulina Kurniawati Fau<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia

Email: febriyantivaleriaroito@gmail.com, Tiurp24@gmail.com, paulinafau07@gmail.com

Email Korespondensi: febriyantivaleriaroito@gmail.com

### ABSTRACT

*This study aims to determine the background of the people of Pluit Putri against the construction of the BTB School, the dynamics of the community's social movements in fighting for their interests, and the influence of social movements on school development plans. PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) as a Regional Owned Enterprise of DKI Jakarta Province, through its subsidiary PT. Jakarta Utility Propertindo (JUP) in 2019, announced a collaboration with Bina Tunas Bangsa School (BTB School) to build a school building around Pluit Putri housing estate. This then received a rejection response from the surrounding community who were members of the Pluit Putri Community Forum. The research method used is descriptive qualitative, with Pichardo's new social movement theory and McAdam's theory of social movement dynamics. The results of the study, firstly, the community refused, because they felt they were not involved in the development carried out in the middle of their housing, both during the development plan and changes in the spatial zoning of some land, and it was predicted that the presence of a school in the middle of the housing would cause congestion and noise. Second, the Pluit Putri social movement was carried out through hearings with the DKI Jakarta DPRD, demonstrations, PTUN, administrative processes, social media and mass media. Third, residents continue to urge that their refusal can affect development plans, in order to slow down the construction of schools that have been informed since 2019, so that school construction has not been completed until now.*

**Keywords:** *Dynamics of Social Movements, Power Relations and Social Movements*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui latar belakang warga Pluit Putri menolak pembangunan BTB School, dinamika gerakan sosial masyarakat dalam memperjuangkan kepentingannya, serta pengaruh gerakan sosial terhadap rencana pembangunan sekolah. PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku Badan Usaha milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, melalui anak perusahaan PT. Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) pada 2019, mengumumkan kerjasama dengan Bina Tunas Bangsa School (BTB School) untuk mendirikan bangunan sekolah di sekitar perumahan Pluit Putri. Hal tersebut kemudian mendapat respon penolakan masyarakat sekitar yang tergabung dalam Forum warga Pluit Putri. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif, dengan teori gerakan sosial baru Pichardo dan teori dinamika gerakan sosial McAdam. Hasil penelitian, pertama, masyarakat menolak, karena merasa tidak dilibatkan dalam pembangunan yang terlaksana di tengah perumahan mereka, baik saat rencana pembangunan maupun perubahan zonasi tata ruang sebagian lahan, serta diprediksi dengan adanya sekolah ditengah perumahan akan menimbulkan kemacetan dan kebisingan. Kedua, Gerakan sosial warga Pluit Putri dilakukan melalui audiensi dengan DPRD DKI Jakarta, demonstrasi, PTUN, proses administrasi, media sosial dan media massa. Ketiga, warga terus mendesak agar penolakannya dapat berpengaruh terhadap rencana pembangunan, guna memperlambat pembangunan sekolah yang telah di informasikan sejak 2019, sehingga pembangunan sekolah yang masih belum rampung hingga kini.

**Kata Kunci:** *Dinamika Gerakan Sosial Masyarakat, Relasi Kuasa dan Gerakan Sosial*

DOI: <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5706>

## PENDAHULUAN

Studi ini menjelaskan Gerakan Sosial masyarakat dalam memperjuangkan hak dalam mengekspresikan pendapat yang tertuang dalam berbagai tindakan. Berdasarkan James C Scott, Gerakan sosial merupakan “Perlawanan Sehari-hari”, yang menegaskan bahwasannya gerakan sosial adalah bentuk yang paling modern dari politik persetujuan. Hal ini terjadi ketika orang-orang biasa yang biasanya dalam kerja sama dengan warga Negara yang berpengaruh, bersama-sama menggalang kekuatan kolektif dalam konfrontasi mereka melawan pemegang otoritas, kelompok elite, atau musuh-musuh politiknya. (Scott, 1993). Seperti halnya gerakan sosial di Jombang yang tertuang dalam penelitian Dita Kurniawati pada tahun 2013, dengan mengangkat judul “gerakan penolakan terhadap kuningisasi di Kabupaten Jombang.” Secara garis besar penelitian tersebut membahas mengenai Gerakan Sosial yang dimana hal ini merupakan bentuk ketidakpuasan suatu masyarakat terhadap pemerintah atau organisasi besar, seperti yang terjadi di Kabupaten Jombang adanya Gerakan “Save Jombang” yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah untuk menghentikan aksi kuningisasi di Jombang. Metode kualitatif-deskriptif adalah metode yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kronologi lahirnya “Save Jombang”, beserta hambatan hambatan yang dialami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang lahirnya gerakan ini memiliki latar belakang ketidakpuasan terhadap pemerintahan mengenai proses yang dinilai sarat permainan politik dari partai bupati terpilih yang identik kuning. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperjuangkan gerakan “Save Jombang” adanya tokoh seperti gomar dan kholid sebagai penggerak yang menginisiasi menjadi suatu gerakan sosial politik. (Kurniawati, 2015)

Fenomena gerakan sosial dalam penelitian ini terwujud melalui peristiwa yang dialami oleh masyarakat Pluit Putri, yang memperjuangkan hak mereka di dalam mengekspresikan pendapat mereka untuk menolak pembangunan sekolah Bina Tunas Bangsa (BTB) *School*. Bermula dari otoritas PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang melangsungkan berbagai macam pembangunan yang diikuti dengan keikutsertaan anak perusahaan dalam membantu perusahaan induk untuk beroperasi pada bidang properti, infrastruktur dan utilitas. (Susilowati, 2013) PT. Jakpro mengutus anak perusahaan PT. Jakarta Utilitas Propertindo (PT. JUP) untuk mengelola lahan yang ada di perumahan Pluit Putri, dengan objek lahan  
**DOI:** <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5706>

tanah seluas 3.999m<sup>2</sup>, berdasarkan ketetapan Rencana Kota Pemerintah Daerah DKI Jakarta Dinas Tata Kota No. 251/Gsb/JU/V/96, diidentifikasi esensi keberadaanya sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasum Fasos) perumahan berupa Taman dan lapangan basket Pluit Putri. Sejak awal warga perumahan setempat memanfaatkan lahan tersebut berbagai macam aktivitas seperti, tempat senam bagi lansia, tempat Pluit Putri Club Basket sebuah kelompok basket perumahan, inisiasi pemuda yang secara rutin melakukan kegiatan latihan di lapangan basket, tempat memperingati hari nasional seperti pencoblosan saat pemilihan umum maupun perlombaan hari kemerdekaan dan berbagai aktivitas sehari-hari lainnya.

**Gambar 1. Plang Fasum Fasos**



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Permasalahan bermula ketika PT. JUP melangsungkan kerjasama dengan Bina Tunas Bangsa *School* (BTB *School*), yang terwujud dalam bentuk rencana mendirikan bangunan sekolah. Tanggal 3 Mei 2019, ketua RT yang berada didekat lokasi pembangunan mendapat undangan sosialisasi yang dilaksanakan di Kelurahan Pluit, dengan pembahasan mengenai pengumuman informasi rencana pembangunan di atas lahan fasum fasos perumahan Pluit Putri berupa taman dan lapangan basket, yang di klaim kepemilikannya oleh PT. Jakpro. Masyarakat Pluit Putri menganggap bahwasanya sosialisasi perdana yang dilaksanakan oleh pihak BTB *School* selaku pihak yang akan melakukan pembangunan BTB *School* hanya dilakukan satu arah, yang dimana rencana tersebut tidak mempertanyakan pendapat warga sekitar lokasi, mengenai persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap rencana pembangunan yang terjadi di lingkungannya.

Hal ini dipengaruhi karena, rencana pembangunan yang dilakukan oleh PT. JUP yang diutus PT. Jakpro selaku pihak pengelola tanah untuk wilayah Pluit, telah melengkapi segala syarat perizinan sebagai justifikasi pendirian bangunan yang salah satu diantaranya dikarenakan perubahan zonasi pada sebagian lahan menjadi coklat, yang diperbolehkan untuk

**Febriyanti Valeria Roito, Tiur Paulinawati, dan Paulina Kurniawati Fau**  
Gerakan Sosial Masyarakat Pluit Putri Jakarta Utara (Studi Kasus: Penolakan Rencana Pembangunan Sekolah Bina Tunas Bangsa)

## JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

mendirikan bangunan seperti fasilitas sekolah melalui regulasi tata ruang yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah-Peta Zonasi (RTRW-PZ), sehingga ketika mendengar informasi rencana pembangunan sekolah, masyarakat setempat dipaksa harus menerima perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Hal ini sontak menghadirkan respon warga terdekat dari lokasi pembangunan yang bertanya atas keberadaannya (Johanna, Wawancara data awal, 2021).

Munculnya rencana pembangunan sekolah ditengah perumahan, sontak mendapat respon penolakan dari warga setempat, khususnya pada masyarakat Rukun warga (RW). 006 perumahan Pluit Putri Jakarta Utara yang terdekat dari objek lokasi pembangunan, yakni diantaranya warga Rukun Tetangga RT. 003, RT. 005, RT. 006. Warga Pluit Putri yang terdiri dari individu-individu, secara alamiah menyatukan kekuatan untuk menyatakan penolakan (Rosa, 2021). Warga tidak hanya berhenti sampai pada menyatakan penolakan, namun hingga memutuskan untuk menjadi partisipan dalam melangsungkan berbagai macam aksi atas adanya tujuan maupun rasa senasib sepenanggungan antara satu sama lain. Warga memutuskan terlibat dengan melakukan penolakan atau desakan untuk mengadakan atau menentang perubahan oleh sekelompok masyarakat dapat dikategorikan sebagai Gerakan Sosial, yang dilakukan atas dasar solidaritas dalam rangka melangsungkan penolakan untuk memperjuangkan lahan fasum fasos berupa taman dan lapangan basket, yang selama ini keberadaannya sudah menjadi bagian dari ruang publik yang tak terpisahkan bagi kegiatan masyarakat setempat, sehingga warga berupaya melalui gerakan sosial untuk menolak rencana pembangunan. Hingga kini warga Pluit Putri tetap mendesak pihak pembangun, dikarenakan rencana bangunan *BTB School* yang belum terbangun secara fisik hingga saat ini.

**Gambar 2. Kondisi Terkini Spanduk Warga Pluit Putri**



Sumber: Dokumentasi Pribadi

DOI: <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5706>

Oleh karena itu, berangkat dari realita tersebut penelitian ini akan berfokus untuk mencari 3 (tiga) hal yakni mengenai latar belakang warga Pluit Putri Jakarta Utara melakukan Gerakan penolakan terhadap rencana pembangunan BTB *School*, kemudian dinamika gerakan sosial warga Pluit Putri dalam memperjuangkan kepentingan, dan pengaruh gerakan sosial tersebut terhadap rencana pembangunan BTB *School*.

### Gerakan Sosial Baru

Partisipasi politik dari masyarakat sipil dalam negara, merupakan hal yang diperlukan dalam Negara Demokrasi. Dalam studi tentang demokrasi, *civil society* merupakan faktor yang dipercaya sangat penting untuk memperkuat demokrasi. (Putnam, 1993; Schmitter, 1995 dikutip oleh Syadzily, 2003:75) dalam (Dwi Retno Hapsari, 2017) Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam pemilihan umum, tentunya dapat juga dari hal lain salah satunya Gerakan Sosial. Terdapat perbedaan dengan pada jenis partisipasi politik dalam pemilihan umum, Gerakan Sosial barulebih mengarah pada tindakan anarkis dan bersifat non formal (Smelser, 1962), namun dapat terlihat Gerakan Sosial Baru tetap dapat membentuk menjadi satu kekuatan. Gerakan sosial baru lebih membidik isu-isu politik identitas dan kualitas hidup seperti hak asasi manusia, gerakan lingkungan, perdamaian, ketimpangan gender dan feminisme yang muncul sejak pertengahan tahun 1960-an. Demikian juga aktor pergerakan atau partisipannya, tidak lagi terkotak-kotak hanya pada aktor kelas pekerja dan petani melainkan meluas dengan melibatkan kelas menengah seperti mahasiswa, kaum intelektual, anak muda, dan lain sebagainya (Ahmad, 2018) Terdapat beberapa aspek yang dapat diidentifikasi dalam gerakan sosial baru menurut Pichardo (1997) dalam (Haynes Soemitro P., 2000) terdiri dari ideologi tujuan, dan taktik atau strateginya, struktur organisasinya sampai pada aktivitasnya, sebagai berikut:

#### 1. Ideologi Tujuan

Gerakan sosial baru mempertanyakan tujuan yang berorientasi kesejahteraan material masyarakat industri juga model demokrasi representatif yang telah membatasi peran dan partisipasi warga negara dalam pemerintahan, sehingga gerakan sosial baru lebih mendorong bentuk-bentuk demokrasi langsung kelompok-kelompok mandiri dan kerjasama organisasi sosial.

#### 2. Taktik dan Strategi

Gerakan sosial baru lebih menyukai *channel-channel* diluar politik resmi dan memakai taktik pengacauan serta memobilisasi opini publik untuk meraih pengaruh politik.

**Febriyanti Valeria Roito, Tiur Paulinawati, dan Paulina Kurniawati Fau**  
Gerakan Sosial Masyarakat Pluit Putri Jakarta Utara (Studi Kasus: Penolakan Rencana Pembangunan Sekolah Bina Tunas Bangsa)

Disamping itu, mereka lebih menyukai menampilkan aksi-aksi dramatik dengan mengenakan pakaian dan representer simbolik dalam aksi-aksi politiknya.

### 3. Partisipan atau Aktor Keanggotaan

Gerakan sosial baru menjadi terbuka, demokratis, non hierarkis. Gerakan sosial baru bersifat lintas kelas yang tentunya berasal dari berbagai lapisan. Perbedaan yang terdapat pada gerakan sosial baru adalah dimana gerakan sosial ini bukan hanya berasal dari kelompok terpinggir atau lapisan terbawah masyarakat, melainkan gerakan sosial baru ini membuktikan bahwa pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga juga dapat menjadi bagian dalam gerakan sosial baru.

### 4. Struktur

Struktur ini menjadi pengorganisir gerakan untuk menyatukan perspektif untuk memikirkan melalui saluran apa gerakan sosial akan disuarakan, yang akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan melalui hal tersebut.

## Dinamika Gerakan Sosial

Gerakan sosial dicetuskan oleh (Doug Mc Adam, 1996), dalam bukunya yang berjudul “*Comparative Perspective on Social Movements: Political Opportunity, Mobilizing Structure, and Cultural Framings*” Ada tiga faktor dalam menganalisis kemunculan dinamika gerakan social yakni sebagai berikut:

### 1. Peluang Politik

Peluang Politik (*Political Opportunity*) menurut Mc Adam ialah suatu ekspresi untuk melakukan analisa tentang keadaan politik yang memiliki pengaruh terhadap kemunculan, struktur, skope dan keberhasilan sebuah gerakan sosial.

### 2. Struktural Mobilisasi

Struktur mobilisasi (*mobilizing structure*) adalah struktur-struktur yang berperan sebagai wahana mobilisasi suatu gerakan sosial. Ahli gerakan sosial menggunakan pemahaman struktur mobilisasi untuk konseptualisasi jaringan sosial dan institusi yang berfungsi sebagai, struktur sosial bagi mobilisasi kolektif dan menjelaskan bentuk organisasi dalam suatu Gerakan.

### 3. Pembingkaiian Kultural

Konteks pembingkaiian kultural dalam gerakan sosial merupakan metode penyajian  
**DOI:** <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5706>

realitas, dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Analisis digunakan untuk mengkaji pembingkaihan realitas (peristiwa, individu, kelompok, dan lainnya) yang dilakukan oleh media massa.

Dengan demikian, penelitian studi kasus yang mengangkat format gerakan sosial warga pluit putri mengaktualisasikan kepentingannya sesuai untuk dioperasionalisasi dengan landasan teori yang telah didekskripsikan diatas. Gerakan Sosial Baru dicerminkan oleh warga pluit putri yang membuat suatu gerakan sosial yang berlangsung ditengah perumahan yang berada dalam ruang lingkup perkotaan Jakarta Utara. Gambaran pemaknaan yang dilakukan oleh warga Pluit putri untuk mengaktualisasikan kepentingannya yang tergambar melalui diksi atribut seperti spanduk yang digunakan dalam melangsungkan Gerakan sosial warga Pluit Putri dalam penolakan rencana BTB *School*, tentunya berlangsung dengan pembingkaihan kultural atau pemaknaan realitas yang tergambar melalui berbagai tindakan gerakan sosial yang disalurkan melalui berbagai macam. Seperti melakukan interpretasi peristiwa yang sekiranya melahirkan memaknai realitas yang ada, untuk menampilkan citra gerakan kepada khalayak umum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif dengan paradigma Induktif. (Hardani, 2020). Pendekatan dengan format demikian, dianggap mampu untuk menjelaskan penelitian yang dirujuk melalui fenomena gerakan sosial dalam konteks dengan kondisi yang terjadi, melalui berbagai pendapat dalam pernyataan naratif untuk memahami secara mendalam sudut pandang subjek penelitian yaitu aktor Gerakan Sosial warga Pluit Putri Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus, dimana menurut Creswell studi kasus dalam sebuah penelitian kualitatif ialah mengkaji tentang konteks kehidupan yang nyata atau sesungguhnya dalam sebuah atau beberapa kasus nyata kontemporer yang masih atau sedang berlangsung dari waktu ke waktu (Kholifah, 2018). Dalam konteks penelitian ini mengangkat studi kasus mengenai gerakan sosial masyarakat Pluit Putri, dalam rangka penolakan terhadap rencana pembangunan BTB *School* yang Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian ini adalah observasi dengan partisipatif pasif di lingkungan taman dan lapangan basket di Pluit Putri, wawancara bersama berbagai pihak yang terkait terdiri dari Ketua Forum Warga Pluit Putri, Ketua RT, Sekretaris



Kelurahan, Ketua Yayasan Bina Tunas Bangsa School, dokumentasi, studi pustaka, dan triangulasi data untuk memvalidasi dengan *cross check* dari berbagai perspektif. (Winarni E. W., 2021). Penelitian ini pula dianalisis dengan model interaksi menurut Miles & Huberman yang dikutip oleh (Martono, 2015) yakni diantaranya melakukan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan sosial diidentifikasi kajiannya dibagi dalam 2 (dua) bagian, yakni gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Dalam teorinya gerakan sosial lama yang hadir ketika era pra industri, tuntutan yang diangkat menjadi isu dalam gerakan lebih kearah ekonomi, upaya perjuangan gerakan kaum proletar yang mengangkat isu seperti, kemiskinan masyarakat, pengangguran, kependudukan, tingkat pendapatan yang tercermin dari gerakan kaum buruh. Berbeda dengan gerakan sosial baru yang hadir ketika *post industry*, mengangkat isu-isu seperti Hak Asasi Manusia, kebudayaan, gaya hidup, dan lingkungan. Umumnya partisipan gerakan sosial baru dilakukan oleh kaum menengah yang tidak tergabung dalam suatu organisasi yang tidak begitu ketat sehingga isu yang diangkat lebih terbuka. (Atang, 2018)

#### Gerakan Sosial Baru Masyarakat Pluit Putri

Dengan demikian, kajian yang tepat untuk diangkat menjadi teori dalam mengasah data penemuan penelitian ini adalah Gerakan Sosial Baru. Gerakan sosial baru menurut Pichardo (1997) dalam (Haynes, 2000), menelusuri bahwasannya gerakan sosial dapat dikatakan sebagai gerakan sosial baru, bila telah memenuhi beberapa aspek yaitu terdiri dari, ideologi tujuan, taktik strategi, struktur organisasi sampai pada aktivitasnya sebagai berikut

1. Ideologi Gerakan Sosial dalam Penolakan Rencana Pembangunan BTB *School*

Dalam format gerakan sosial baru menurut Pichardo, bukan lagi mempersoalkan perihal isu perekonomian seperti pada masa pra industri dalam gerakan sosial lama namun lebih kearah isu yang lebih meluas seperti Hak Asasi Manusia, kebudayaan, gaya hidup, dan lingkungan. Hal ini selaras dengan realita gerakan sosial yang dilakukan oleh warga Pluit Putri, yakni pada saat melakukan gerakan, warga mengangkat beberapa isu yang mereka yakini sekiranya menjadi tolak ukur perjuangan. Isu yang diangkat dalam gerakan mencerminkan ideologi atau tujuan yang dilakukan oleh warga Pluit Putri yakni mengenai

**DOI:** <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5706>



isulingkungan dan kebijakan publik.

Pertama, isu lingkungan hadir atas dasar keberatan warga bilamana rencana pembangunan sekolah terealisasi yang akan memberikan dampak, seperti yang diketahui bahwa akses pintu keluar masuk perumahan berada disebelah pembangunan sehingga sudah bisa ditebak dapat menimbulkan kemacetan dan kebisingan (Hartadinata, 2022). Peristiwa penebangan pohon yang dilakukan untuk revitalisasi lapangan basket yang membuat masyarakat kecewa tanpa melihat bahwasannya ruang terbuka untuk naungan Pluit Putri hanya ada pada objek lahan sengketa tersebut. Dengan demikian, masyarakat merasa ruang publik tidak akan seperti dahulu yang dapat diakses secara bebas, namun kehadiran rencana pembangunan membuat akses terhadap ruang publik tersebut menjadi tidak seutuhnya. (Johanna, 2022).

### Gambar 3. Demonstrasi Penebangan Pohon Pluit Putri



Sumber: (Hamonangan, 2019)

Kedua, mengenai isu Administrasi, dapat diketahui bahwa jauh sebelum rencana pembangunan di taman dan lapangan basket terdapat Rencana pemerintah daerah mengenai kebijakan RTRW dan RDTR-PZ, dimana Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya membuka kesempatan untuk menjangring aspirasi masyarakat, terkait perubahan fungsi atau zonasi apa yang akan terjadi di wilayahnya, namun demikian warga Pluit Putri tidak pernah diikutsertakan dalam proses penjangringan aspirasi tersebut. Peraturan Daerah RDTR-PZ DKI Jakarta, yang mengubah zonasi tata ruang objek lahan yang sebelumnya hanya taman dan lapangan basket kemudian ditambah dengan adanya fasilitas sekolah. Hal ini yang kemudian diangkat oleh warga Pluit Putri untuk mempertanyakan keberadaan dari peraturan tersebut dengan melakukan gugatan administrasi, melalui produk hukum yang disediakan oleh Perda Nomor 1 tahun 2014. Masyarakat mengajukan keberatan administrasi kepada Dinas Cipta Kerja dan Dinas Tata Ruang dengan menyusun poin-poin keberatan, yaitu seperti yang

**Febriyanti Valeria Roito, Tiur Paulinawati, dan Paulina Kurniawati Fau**  
Gerakan Sosial Masyarakat Pluit Putri Jakarta Utara (Studi Kasus: Penolakan Rencana Pembangunan Sekolah Bina Tunas Bangsa)

diketahui bahwa luas objek lahan sebesar 3.955 m<sup>2</sup> tidak semua dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta hanya seluas 1.747,70 m<sup>2</sup> jika dikalkulasikan untuk pembangunan sekolah dengan gedung 3 (tiga) tingkat maka jumlah tanah yang diperbolehkan hanya sebesar 582 m<sup>2</sup> sehingga hal ini di sampaikan melalui kuasa hukum Pluit Putri<sup>0</sup>. Desember 2020, telah keluar surat Surat teguran, surat penyegehan, surat perintah bongkar. Namun hal tersebut tidak terlaksana, yang mana prosesnya masih berlangsung hingga saat ini.

### 2. Partisipasi atau aktor keanggotaan Gerakan Sosial Masyarakat Pluit Putri

Partisipasi gerakan sosial baru lebih bersifat multikultural dalam partisipasinya serta terbuka untuk semua kalangan sehingga partisipan gerakan tidak terkotak-kotak berdasarkan satu jenis kalangan saja. Hal ini tergambar dari partisipan gerakan sosial baru Warga Pluit Putri yang terdiri dari beragam elemen masyarakat yang memperjuangkan kepentingannya, berdasarkan latar belakang profesinya terdiri dari ibu rumah tangga, pengusaha, pegawai swasta, dll. Terdapat keunikan pada Gerakan Sosial yang terjadi di Pluit Putri Jakarta Utara dikarenakan Gerakan Sosial ini lahir dari di perkotaan dengan ruang lingkup kecil disebuah perumahan, yang menyuarakan kepentingannya melalui aktor-aktor yang lebih beragam. Tentunya gerakan sosial baru tergambar pada masyarakat Pluit Putri yang memiliki partisipan gerakan sosial lintas kelas, terbuka untuk semua warga, non hierarkis, serta demokratis. Tentu hal tersebut sangat sukar ditemukan dalam Gerakan Sosial yang pada umumnya dilakukan oleh aktor-aktor lokal atau daerah yang termarginalkan, namun realitas dalam format gerakan sosial di Pluit Putri terjadi sebaliknya, yakni partisipan yang ikut serta dalam gerakan terdiri dari masyarakat menengah keatas serta tinggal di perumahan Ibukota Jakarta, yang mana notaben pola kehidupan masyarakatnya individualisme.

### Taktik dan Strategi Gerakan Sosial Masyarakat Pluit Putri

Gerakan sosial dapat dikatakan sebagai gerakan bila memiliki taktik maupun strategi yang digunakan, pada saat melangsungkan gerakan untuk memperjuangkan apa yang diyakini oleh aktor gerakan. Taktik dan strategi yang dilakukan oleh warga Pluit Putri melalui berbagai macam cara, yang sudah direncanakan dan disepakati terlebih dahulu untuk di realisasikan dalam format gerakan sosial. Bermula pada 8 Juli 2019, melakukan pengaduan atau audiensi untuk menyalurkan aspirasi kepada DPRD DKI Jakarta Komisi C dan Komisi A. Masyarakat pula aksi demonstrasi ke lapangan yang berlangsung sebanyak 3 kali pada tahun 2019, Demonstrasi yang terlaksana di depan kantor PT. JUP maupun di objek lahan yang sedang

**DOI:** <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5706>

diperjuangkan, guna menyalurkan aspirasi atau protes untuk diangkat dan tergambar pada spanduk yang terbentang dengan membawa spanduk bertuliskan protes- protes warga dalam gerakan sosial. Masyarakat Pluit Putri pula menggunakan taktik melalui ranah hukum dengan mengajukan gugatan kepada pihak tergugat ke ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

**Gambar 4. Peninjauan Lahan Melalui Peradilan Usaha Tata Negara**



Sumber: (Hamonangan, 2020)

Masyarakat pula melakukan taktik dalam bentuk virtual yakni melalui media sosial. Masyarakat melalui forum warga Pluit Putri menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan, menyuarakan hal tersebut dengan membuat sebuah video singkat di *Platform Youtube*, yang menceritakan tentang aspirasi kritis yang terjadi pada lingkungannya melalui *Channel Youtube* Forum Warga Pluit Putri dengan judul “Kembalikan Ruang Terbuka Hijau dan Lahan Fasum Fasos Kami”. Video tersebut memiliki sekitar 2.700 penonton.

**Gambar 5. Channel Youtube Forum Warga Pluit Putri**



Sumber: (Kembalikan Ruang Terbuka Hijau dan Lahan Fasum/Fasos Kami !, 2020)

da Kendati demikian, menyuarakan aspirasi melalui media massa pula terlaksana dalam

**Febriyanti Valeria Roito, Tiur Paulinawati, dan Paulina Kurniawati Fau**  
Gerakan Sosial Masyarakat Pluit Putri JakartaUtara (Studi Kasus: Penolakan Rencana Pembangunan Sekolah Bina Tunas Bangsa)

## JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

taktik format gerakan sosial terlaksana melalui media massa konferensi pers, dengan mekanismenya nantinya dari berbagai pertanyaan yang diajukan oleh wartawan dalam konferensi pers akan menaikkan kasus melalui berita di media massa.

### 3. Struktur organisasi Informal Forum Warga Pluit Putri

Struktur digunakan untuk pengorganisir gerakan sosial, agar apa yang disalurkan dapat memiliki kekuatan ketika menyuarakan kepentingan secara bersama. Maka dari itu struktur dalam gerakan sosial dibutuhkan untuk menjadi pengikat yang terwujud dalam bentuk organisasi. Hal ini ditemukan dalam studi kasus masyarakat Pluit Putri, yang mana dalam melaksanakan gerakan sosial dalam rangka menolak rencana pembangunan BTB School terbentuk organisasi informal, yang hadir sebagai kendaraan bagi gerakan untuk berbagi informasi maupun merumuskan taktik. Organisasi informal tersebut diberi nama Forum Warga Pluit Putri, terdiri dari penggabungan antara 3 (tiga) RT yakni terdiri dari RT.003, RT.005 dan RT.006. Forum warga Pluit Putri diketuai oleh Rosa Aliandoe selaku warga RW.006 yang ditunjukkan oleh warga karena memiliki latar belakang pendidikan hukum selaras dengan kasus ini yang notabennya akan berhadapan dengan ranah hukum. Kendati demikian, walaupun dalam forum hanya dipilih ketua saja, namun dalam pelaksanaannya ketua RT dalam satu blok hunian perumahan Pluit Putri menjadi perwakilan dari tiap RT yang melakukan pengawasan terhadap perkembangan kasus selama proses yang telah dijalani dalam gerakan, nantinya bilamana dari warga para aktor gerakan ingin merealisasikan maupun mempertanyakan perkembangan kasus sudah sejauh mana, dapat melalui para ketua RT yang mengkoordinasikan sesuai wilayah naungannya.

**Tabel 1.1 Forum Warga Pluit Putri**

No.	Nama	Jabatan
1.	Rosa Aliandoe	Ketua Gerakan Sosial Forum Warga Pluit Putri
2.	Johanna Aliandoe	Ketua RT 005/RW 006 Koordinator wilayah RT.005
3.	Naning Hartadinata	Ketua RT 003/RW 006 Koordinator wilayah RT. 003
4.	Yanita Hartanto	Ketua RT 006/RW 006 Koordinator wilayah RT.006 (ketua RT lama)

5.	David	Ketua RT 006/RW 006 Koordinator wilayah RT. 006 (ketua RT baru)
----	-------	--

### **Dinamika Gerakan Sosial dalam Menolak Pembangunan Sekolah Bina Tunas Bangsa**

Masyarakat Pluit Putri melakukan Gerakan sosial dan memiliki dinamika yang dihasilkan dari penemuan atas strategi yang digunakan dalam memperjuangkan apa yang diyakini oleh aktor gerakan sosial singkatnya kepentingan dalam gerakan, untuk mengamabarkan hal tersebut dalam format gerakan sosial maka teori yang dicetuskan oleh McAdam tepat untuk menjelaskan mengenai keseluruhan dinamika yang terjadi dalam gerakan sosial. McAdam membagi 3 (tiga) kategori yang akan jelaskan menggunakan data yang temukan dalam gerakan sosial baru warga Pluit Putri, yakni diantaranya: PeluangPolitik, implementasi dalam Gerakan sosial warga Pluit Putri memakai peluang politik sebagai bentuk upaya rasional kelompok yang meyakini apa yang diperjuangkan untuk memperoleh pengaruh yang cukup demi memajukan kepentingannya melalui saluran politik.

#### **1. Peluang Politik**

Masyarakat Pluit Putri memanfaatkan peluang politik, dengan melakukan pengaduan kepada salah satu Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan komisi C DPRD DKI Jakarta. Pengaduan yang dilakukan warga melalui saluran politis untuk menyatakan aspirasi dilakukan, dengan harapan peluang politik untuk menyalurkan aspirasi melalui wakil rakyat dapat ditindaklanjuti untuk mengakomodir kepentingan sesuai apa yang diharapkan warga. Hal yang diangkat oleh warga ketika melakukan pengaduan ke DPRD ialah mengenai lahan yang sedang dipermasalahkan berupa taman dan lapangan basket sebesar 3999 m2 ditengah blok perumahan Pluit Putri Jakarta Utara sejauh ini diakui warga sebagai fasum dan fasos, yang sudah sejak lama digunakan warga sebagai ruang publik perumahan secara umum yang digunakan untuk berbagai kegiatan sosial warga sekitar, namun di lokasi yang sama juga diakui kepemilikannya oleh PT. Jakpro selaku BUMD DKI Jakarta yang memberikan mandat untuk mengelola kepada anak perusahaan PT. JUP yang saat ini akan melangsungkan kerjasama dengan Pihak BTB untuk mendirikan bangunan sekolah disebagian lahan sehingga kehadirannya menimbulkan respon penolakan dari warga sekitar.

Pengaduan yang berisikan perihal pengaduan, mohon waktu untuk dilakukan pertemuan atau audiensi, mohon waktu untuk dilakukan peninjauan ke lapangan, dan mohon da perlindungan hukum untuk pembatalan Pengalihan Fungsi Lahan RTH atau Fasum Fasos



## JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

menjadi komersil. Pihak DPRD DKI Jakarta melalui komisi C menindaklanjuti surat pengaduan warga dan mengupayakan jalan terbaik untuk kedua belah pihak. Setelah ditelusuri berdasarkan data antara kedua belah pihak, pihak DPRD melihat bahwa apa yang dilakukan atas pembangun sekolah adalah sesuatu yang sah dilakukan karena sudah memenuhi persyaratan serta menyesuaikan aturan yang ada, sehingga pihak DPRD melalui komisi C menyarankan untuk kedua belah pihak untuk berdamai dan memakai fasilitas yang ada untuk kepentingan bersama. Warga tidak menerima jalan damai yang ditawarkan oleh DPRD karena jika hal tersebut dilakukan maka apa yang menjadi tujuan warga yakni menolak rencana pembangunan sekolah tidak akan terealisasi dan belum menemukan titik temu yang tepat untuk melalui jalan damai, sehingga hal ini yang kemudian membuat warga beralih untuk mengupayakan gerakan sosial melalui cara apapun.

### **Gambar 6. Pengaduan Warga Pluit Putri Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Komisi C**



Sumber: (Umasugi, 2020)

Masyarakat Pluit beberapa kali juga melangsungkan gerakan sosial melalui demonstrasi di depan lahan pembangunan. Sebelum Pandemi COVID-19, warga yang melakukan demonstrasi memiliki atribut untuk menyuarakan aspirasi melalui spanduk yang dibentangkan. Oleh Warga Pluit Putri, agar sekiranya dapat terlihat oleh pihak pembangun untuk ditanggapi bahkan ditindaklanjuti. Namun demonstrasi yang dilakukan warga Pluit Putri tidak mendapat tanggapan dari pihak-pihak terkait.

### **Struktur Mobilisasi**

Gerakan sosial pada dasarnya ialah bentuk dari mobilisasi agar isu yang diperjuangkan secara bersama antara 3(tiga) RT memiliki kekuatan melalui organisasi informal bernama Forum Warga Pluit Putri. Singkatnya warga dengan kepentingan yang sama melakukan

**DOI:** <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5706>

mobilisasi agar lebih memiliki kekuatan dalam menyuarakan apa yang diyakini sehingga membentuk suatu struktur organisasi forum warga Pluit Putri sebagai kendaraan untuk mengkoordinasikan gerakan sosial. Mobilisasi warga dalam balutan forum warga Pluit Putri memiliki bentuk kontribusi yang cukup bervariasi. Ada yang berkontribusi dalam hal materi, merekomendasikan ide-ide gerakan sosial, dan kontribusi untuk turun ke lapangan melakukan beberapa kali demonstrasi. Struktur mobilisasi ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memberikan bentuk kontribusi yang hadir dalam gerakan sosial yang diantaranya terlaksana seperti, memberikan rekomendasi ide gerakan untuk menyuarakan aspirasi dengan melakukan audiensi bersama DPRD DKI Jakarta, kemudian merekomendasikan pelibatan media massa maupun media untuk mengemas informasi tentang peristiwa di lingkungan Pluit Putri, dengan misi membentuk dan menggiring opini publik yang tercantum dalam berita. Turun lapangan dengan melakukan demonstrasi di depan kantor PT. JUP dan objek lahan pembangunan pula dilakukan koordinasi mobilisasi massa untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk dapat ditindak lanjuti oleh pihak terkait.

**Gambar 7. Demonstrasi di Kantor PT. Jakarta Utilitas Propertindo**



Sumber: (Hamonangan, 2019)

## 2. Pembingkai Kultural

Konteks pembingkai kultural dalam gerakan sosial merupakan metode penyajian realitas, di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Analisis digunakan untuk mengkaji pembingkai realitas (peristiwa, individu, kelompok, dan lainnya) yang dilakukan oleh media massa. Dalam penelitian ini warga pluit putri mengaktualisasikan kepentingannya sesuai dengan landasan teori yang telah didekskripsikan. Gerakan Sosial Baru dicerminkan oleh warga pluit putri yang membuat suatu gerakan sosial yang berlangsung ditengah perumahan yang berada

**Febriyanti Valeria Roito, Tiur Paulinawati, dan Paulina Kurniawati Fau**  
Gerakan Sosial Masyarakat Pluit Putri Jakarta Utara (Studi Kasus: Penolakan Rencana Pembangunan Sekolah Bina Tunas Bangsa)



dalam ruang lingkup perkotaan Jakarta Utara. Gambaran pemaknaan yang dilakukan oleh warga Pluit Putri untuk mengaktualisasikan kepentingannya yang tergambar melalui diksi atribut seperti spanduk yang digunakan dalam melangsungkan Gerakan sosial warga Pluit Putri dalam penolakan rencana BTB *School*, tentunya berlangsung dengan peningkatan kultural atau pemaknaan realitas yang tergambar melalui berbagai tindakan gerakan sosial yang disalurkan melalui berbagai macam. Seperti melakukan interpretasi peristiwa yang sekiranya melahirkan memaknai realitas yang ada, untuk menampilkan citra gerakan kepada khalayak umum.

### SIMPULAN

Gerakan sosial lahir sebagai manifestasi kekuatan dalam masyarakat, yang dapat dapat dipengaruhi oleh berbagai fenomena yang melingkupinya. Berdasarkan realita yang diangkat dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwasannya; pertama, alasan penolakan warga Pluit Putri dikarenakan kekecewaan terhadap pihak pembangun yang tidak melibatkan warga dalam perencanaan pembangunan sekolah yang memberikan efek terhadap lingkungan. Selain itu, warga pula khawatir terhadap akses buruk yang ditimbulkan bilamana pembangunan sekolah tersebut terjadi maka akan menimbulkan kemacetan dan kebisingan. Bukan hanya itu saja, dalam penolakan warga pula mengangkat landasan perubahan administrasi atau kebijakan publik, yang membuat perubahan terhadap zona tata ruang yang sebelumnya sebagian besar terdiri dari ruang terbuka publik berupa taman dan lapangan basket, namun terdapat penambahan fasilitas sekolah yang membuat lokasi pembangunan sekolah sesuai dengan zonasi yang sesuai regulasi. Kedua, gerakan sosial ini pula mengalami dinamika tersendiri dalam menyalurkan aspirasi untuk memperjuangkan kepentingannya dalam menolak rencana pembangunan dengan berbagai upaya, menurut McAdam gerakan sosial dapat dikatakan berdinamika jika memakai peluang politik, struktur mobilisasi, dan peningkatan kultural yang semuanya telah dilalui oleh gerakan sosial warga Pluit Putri, yakni seperti mengekspresikan aspirasi melalui organisasi informal warga Pluit Putri, saluran politis demonstrasi maupun mengajukan aspirasi kepada DPRD DKI Jakarta, mengarungi ranah hukum, media massa pers maupun media sosial melalui platform. Ketiga, terkait pengaruh gerakan sosial terhadap rencana pembangunan, untuk saat ini warga mengatakan pengaruh masih dalam skala mengulur pembangunan sekolah yang sejak diumumkan 2019 silam hingga kini yang belum terealisasi secara fisik, walaupun saat ini pembangunan sedang

**DOI:** <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5706>

beroperasi. Namun secara garis besar, upaya-upaya yang dilakukan gerakan sosial warga Pluit Putri untuk saat ini belum dapat mempengaruhi rencana pembangunan sesuai dengan kepentingan warga, namun lebih ke arah memperlambat pembangun, karna tentu jika aktor gerakan melakukan gerakan sosial melalui saluran apapun, harus ditanggapi oleh pihak pembangun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2018). Gerakan sosial dan kebudayaan: teori dan strategi perlawanan masyarakat adat atas serbuan investasi tambang. Malang: Intrans Publishing.
- Doug Mc Adam, J. D. (1996). Comparative perspection social Movements: Political Opportunities, Mobilizing structure and Cultural Framing. NewYork: Cambridge University Press.
- Dwi Retno Hapsari, B. K. (2017). Jaringan Komunikasi Dalam Partisipasi Gerakan Sosial Lingkungan: Studi Pengaruh Sentralitas Jaringan terhadap Partisipasi Gerakan Sosial Tolak Pabrik Semen Pada Komunitas Adat Samin di Pati Jawa Tengah. Jurnal Komunikasi Indonesia, 123.
- Hamonangan, J. (2019, November 4). Warga Demo Penebangan Pohon di Komplek Pluit Putri oleh PT. JUP. Retrieved from Wartakota: <https://wartakota.tribunnews.com/2019/11/04/warga-demo-penebangan-pohon-di-komplek-pluit-putri-oleh-pt-jup>
- Hamonangan, J. (2019, Juli 15). Warga Pluit Demo di Depan Kantor Jakpro Tolak Rencana Pembangunan Sekolah. Retrieved from Wartakota: <https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/16/warga-pluit-demo-di-depan-kantor-jakpro-tolak-rencana>
- Hamonangan, J. (2020, Februari 7). Majelis Hakim Tinjau Sengketa Lahan di Jalan Taman Pluit Putri yang Akan Dibangun Sekolah. Retrieved from Tribun News: <https://wartakota.tribunnews.com/2019/11/19/majelis-hakim-tinjau-sengketa-lahan-di-jalan-taman-pluit-putri-yang-akan-dibangun-sekolah>
- Hardani, H. A. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Hartadinata, N. (2022, Mei 10). Wawancara Bersama Masyarakat Pluit Putri.
- Haynes, J. (2000). Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga, terj. P. Soemitro. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Johanna. (2021, Desember 3). Wawancara data awal.
- Johanna. (2022, Mei 10). Wawancara bersama Masyarakat Pluit Putri.
- Kholifah, S. &. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif: Berbagai Pengalaman dari Lapangan. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kurniawati, D. (2015). Gerakan Penolakan Terhadap Kuningan di Kabupaten Jombang. Jurnal Politik Muda, 186-194.
- Martono, N. (2015). Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci . Jakarta: Rajawali Press.
- Putri, F. W. (Director). (2020). Kembalikan Ruang Terbuka Hijau dan Lahan Fasum/Fasos

## JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

- Kami ! [Motion Picture].
- Rosa. (2021, Desember 3). Wawancara Data Awal.
- Scott, J. C. (1993). *Perlawanan Kaum Tani*. Indonesia: Yayasan Obor Indonesia.
- Smelser, N. (1962). *Theory of Collective Behaviour* (by Tony Tampake). New York: The Free Press.
- Susilowati, N. L. (2013). *Komparasi Sistem Remunerasi pada Instansi Pemerintahan dan BUMD*. Jakarta: Lipi press.
- Umasugi, R. A. (2020, Juli 8). Tolak RTH Dijadikan Sekolah, Warga Pluit Putri Mengadu ke DPRD DKI Jakarta. Retrieved from Kompas.com: <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/08/19593791/tolak-rth-dijadikan-sekolah-warga-pluit-p-utri-mengadu-ke-dprd-dki>
- Winarni, E. d. (2021). *Teori dan praktik penelitian kuantitatif, kualitatif, PTK*. Jakarta: Bumi Aksara.